

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah di Asia Tenggara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Dalam perkembangannya pemerintah gencar melaksanakan pembangunan nasional mencakup berbagai aspek (Multika Sari, 2022). Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya terencana dan berkelanjutan yang diinisiasi oleh negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Siti Hajar, 2022). Pembangunan nasional terdiri dari sasaran dan usaha pembangunan di tingkat daerah. Pembangunan daerah pada konteks pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting, karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional (Mahadiansar, Ikhsan, & Sentanu, 2020).

Pembangunan pada sektor pariwisata merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk pengembangan suatu daerah (Erwina, 2019). Sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan devisa negara (Sekarsari et al., 2020). Indonesia memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi didukung oleh kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan jumlah nilai devisa terhadap pendapatan negara.

Tabel 1. 1 Jumlah Devisa Sektor Pariwisata

No	Tahun	Nilai Devisa (miliar US \$)
1	2020	3,38
2	2021	0,52
3	2022	6,78
4	2023	14,00
5	2024	16,71

Sumber: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2024

Tabel 1.1 menjelaskan meskipun mengalami fluktuasi, terutama penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021, peningkatan terlihat kembali pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 16,71 miliar US\$. Data ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara, sehingga menjadikannya komoditas yang sangat potensial untuk terus dikembangkan.

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang menggerakkan sistem, aktor tersebut terdiri dari berbagai sektor yang secara umum dikategorikan dalam tiga pilar utama yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah (Kholailah, Wulandari, & Murtiningsih, 2022). Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan sempurna apabila adanya kontribusi yang nyata dari tiga pilar utama yang sama – sama merencanakan pembangunan, pemberdayaan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata (Yerik Afrianto, 2025).

Salah satu cara pemerintah untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah dengan mengembangkan desa wisata. Dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang mengoptimalkan potensi lokal, baik dari aspek sumber daya alam, budaya, maupun kehidupan sosial masyarakatnya, untuk dijadikan daya tarik wisata (Ulum, 2021). Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2011 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata menjelaskan bahwa Desa Wisata merupakan suatu bentuk interaksi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pada tahun 2024, Indonesia mencatatkan jumlah desa wisata yang signifikan, mencapai total 6.112 desa. Dari keseluruhan angka tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas dengan jumlah desa wisata terbanyak yaitu sebanyak 615 desa wisata.

Terbentuknya desa-desa wisata umumnya berasal dari keyakinan bahwa potensi daya tarik yang dimiliki seperti alam, budaya, dan tradisi masyarakat, mampu menarik minat sekelompok wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Arief, Yusuf, & Setiawan, 2025). Dalam mengembangkan potensi desa wisata diperlukan kemampuan manajemen pemerintahan yang baik. Kemampuan manajemen pemerintahan desa menjadi penting dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata. Selain pemerintah desa, keikutsertaan masyarakat setempat juga diperlukan. Dalam pengembangan desa wisata saat ini sering dilimpahkan kepada Unit Pelaksana Teknis yang terbentuk dari masyarakat setempat yaitu kelompok atau komunitas desa seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) atau Tim

Wisata, hal ini disebabkan agar dalam hal menggali potensi daya tarik atau mengembangkan destinasi yang sudah ada dapat dilakukan secara intensif (Setiadi & Pradana, 2022).

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen penting yang berasal dari masyarakat setempat yang memiliki kontribusi dan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan potensi kepariwisataan di daerahnya serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau SK Kades, yang anggotanya terdiri dari para masyarakat setempat yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kepariwisataan di wilayah Desa (R. M. Moch Wispandono, 2022). Keberadaan pokdarwis memiliki peran aktif sebagai penggerak dalam meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat lain dalam pengembangan pariwisata (Noer, 2019). Masyarakat dapat berperan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat sebagai subjek ataupun pelaku pada pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dan memiliki peran yang strategis dalam upaya pengembangan kepariwisataan di daerah (Panji Try Yatmaja, 2019).

Pembangunan kepariwisataan tersebut memerlukan peningkatan peran masyarakat yang memerlukan upaya pemberdayaan (*empowerment*), sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dan optimal yang sekaligus mendapatkan manfaat positif dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraannya. Peningkatan peran masyarakat diperlukan dalam pembangunan

kepariwisataan karena pemanfaatan potensi pariwisata dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan yang optimal jika dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan adalah suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Siagian, 2022). Pemberdayaan menurut (Tambunan, 2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan guna meningkatkan kompetensi masyarakat untuk semakin mampu dalam memenuhi kebutuhannya dan juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan bagi perkembangan ekonomi, upaya-upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta berdampak juga kepada kehidupan sosial setempat (Supiani, 2024).

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan serta dapat berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati jika dilakukan dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Yudhi Novrizal, Sopiin, Agus Marwanto, & Tentrem Rahardjo, 2025). Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) harus dilakukan dengan kriteria berkelanjutan sesuai dan mendukung sistem ekologis secara jangka panjang juga layak secara ekonomi, adil secara etika dan

sosial terhadap masyarakat (Iqbal, 2022). Menurut Hadiwijoyo (2012:64-65) dalam penelitian (Prihantika & Utoyob, 2019) menerangkan bahwa pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian, memberi peluang bagi generasi muda untuk memanfaatkan dan mengembangkannya berdasarkan tatanan sosial yang telah ada, sehingga pariwisata berkelanjutan dilandasi oleh upaya pemberdayaan baik dalam batasan sosial, ekonomi maupun kultural dimana masyarakat sebagai aktor utama untuk menggerakkan pariwisata yang optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan desa wisata di Jawa Timur, Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah yang turut berkontribusi signifikan. Kabupaten Madiun telah mengembangkan sejumlah desa wisata, dengan total 14 desa wisata yang tercatat, menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk sektor pariwisata. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam memberdayakan masyarakat dalam pengembangan desa wisata dilakukan melalui komunitas khususnya pada sektor pariwisata sehingga masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan pariwisata di daerahnya. Desa wisata yang ada di Kabupaten Madiun antara lain ; Brumbun, Desa Sentra Porang, Gunungsari, Kalikerto, Kampoeng Brem, Kare, Kepel, Monumen Kresek, Nglambangan, Peken Lawas Candimulyo, Religi Kuncen, Sabin Tumpuk, Sendang Tirto dan Watu Rumpuk.

Di antara berbagai desa wisata yang berkembang di Kabupaten Madiun, Desa Wisata Gunungsari menunjukkan progresivitas yang signifikan.

Perkembangan ini terlihat dari pencapaiannya dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), di mana pada tahun 2022 Desa Gunungsari berhasil menempati posisi 500 besar. Konsistensi pengembangan dan inovasi yang dilakukan kemudian mengantarkan Desa Gunungsari pada peningkatan peringkat yang substansial, yaitu berhasil masuk dalam 50 besar ADWI pada tahun 2024.

Tabel 1. 2 Data Penghargaan ADWI Kabupaten Madiun

No	Desa Wisata	ADWI 2021	ADWI 2022	ADWI 2023	ADWI 2024
1	BRUMBUN	-	-	-	300 besar
2	Desa Sentra Porang	-	-	-	300 besar
3	Gunungsari	-	500 Besar	-	50 besar
4	Kalikerto	-	-	-	-
5	Kampoeng Brem	-	-	-	-
6	Kare	-	-	-	100 besar
7	Kepel	-	-	-	-
8	Monumen Kresek	-	-	-	-
9	Nglambangan	-	-	-	-
10	Peken Lawas Candimulyo	-	-	-	-
11	Religi Kuncen	-	-	-	-
12	Sabin Tumpuk	-	-	-	-
13	Sendang Tirto	-	-	-	-
14	Watu Rumpuk	-	300 besar	-	300 besar

Sumber : Kemenparekraf Indonesia, 2025

Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur merupakan satu-satunya desa wisata di Kabupaten Madiun yang mengusung tema kebudayaan dan kearifan lokal yang sangat kental. Atraksi wisata di Desa Gunungsari mencakup sepuluh obyek pemajuan kebudayaan yaitu adat istiadat, Bahasa, manuskrip, ritus, seni, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional dan permainan rakyat sesuai dengan amanat Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017. Desa Wisata Gunungsari menjadi satu-satunya desa di Indonesia yang memiliki Kalender Event Wisata dimana setiap bulan dalam sepanjang tahun akan digelar berbagai festival bertemakan kuliner, dikombinasi dengan pagelaran seni budaya, seminar, pameran dan *workshop*. Melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setono Taruno Puroboyo Wisata Budaya dikemas melalui paket – paket yang menarik untuk pengunjung yang datang. Pokdarwis Setono Taruno Puroboyo atau disingkat Setopuro sebagai penanggung jawab utama pengembangan konsep pasar budaya Pasar Pundensari, Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gunungsari Nomor 140/50/KPTS/402.07/2022, mengenai penetapan Kelompok Sadar Wisata Sentono Taruno Puroboyo di Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun dalam pembangunan dan mengelola potensi daerahnya menunjukan keterlibatan masyarakat melalui komunitas sektor pariwisata.

Desa Gunungsari telah mengembangkan berbagai destinasi wisata yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setono Taruno Puroboyo (Setopuro), mencakup aspek edukasi, budaya, dan ekonomi, Adapun daftar destinasi wisata yang dikelola Pokdarwis Setopuro antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Daftar Destinasi Wisata Desa Wisata Gunungsari

No	Nama Destinasi
1	Pasar Pundensari
2	Museum Purabaya
3	Edukasi Budidaya Maggot
4	Edukasi Budidaya jangkrik
5	Galeri Batik Demung
6	Budidaya tawon kalnceng (Madu Tiga Satria)
7	Budidaya Sapi
8	Benih Padi
9	Kriya Pot

Sumber : Pokdarwis Setopuro, 2025

Dari banyaknya destinasi wisata yang ada di Desa Gunungsari, Pasar Pundensari merupakan salah satu pasar tradisional yang mengalami perkembangan pesat, yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan setiap tahunnya (Setianingsih & Setiawan, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pasar tradisional dengan nuansa wisata budaya memiliki daya tarik yang lebih adaptif terhadap minat wisatawan kontemporer, terutama yang mengutamakan pengalaman kuliner dan belanja produk autentik. Pengunjung yang datang ke Pasar Pundensari berasal dari wisata lokal hingga manca negara yang ingin menikmati wisata pasar budaya di Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.



Gambar 1. 1 Peningkatan Kunjungan Pasar Pundensari

Sumber : Pokdarwis Setopuro, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah pengunjung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 12.382 pengunjung. Namun, di tahun 2020, terjadi penurunan signifikan menjadi 10.231 pengunjung, diduga akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. penurunan terus berlanjut pada tahun 2021 dengan jumlah pengunjung hanya mencapai 6.773. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan drastis dengan jumlah pengunjung melonjak menjadi 17.873, menunjukkan pemulihan aktivitas setelah pelonggaran pembatasan sosial. Kemudian, pada tahun 2023, angka pengunjung kembali meningkat mencapai 20.325. Terakhir, di tahun 2024, jumlah pengunjung mencapai rekor tertinggi, yakni 21.982, yang mencerminkan pertumbuhan konsisten dalam minat masyarakat terhadap Pasar Pundensari. Hal ini bukan tanpa sebab melainkan adanya upaya dari Pokdarwis untuk mengembangkan dan mengelola Pasar Pundensari sehingga dapat menarik wisatawan dan juga menarik minat masyarakat untuk ikut berjualan di Pasar Pundensari.



Gambar 1. 2 Pasar Pundensari

Sumber : Pasar Pundensari, 2025

Pasar Pundensari merupakan pasar tradisional yang mengusung kebudayaan jawa kuno dengan menyajikan wisata budaya untuk menarik para pengunjung sehingga tidak hanya digunakan sebagai transaksi antara penjual dan pembeli namun juga sebagai pelestari budaya tradisional (Rossevelt & Riyanto, 2021). Pasar Pundensari pertama digelar pada 7 April 2019. Pasar Pundensari terdiri dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana para pelaku UMKMnya merupakan masyarakat setempat yang menjual berbagai macam kuliner lokal, hingga oleh oleh khas desa Gunungsari. Pasar Pundensari beroperasi pada hari Minggu dengan jam operasional pukul 06.00 hingga 11.00 WIB. Pasar Pundensari memiliki keunikan dalam hal spiritual karena diadakannya upacara kecil sebelum pasar dibuka untuk meminta keberkahan kepada leluhur. Pasar Pundensari memiliki keunikan pada sistem pembayarannya karena menggunakan uang bambu Alat transaksi dari bambu tersebut menyajikan 3 warna yaitu putih dengan simbol dua ribu rupiah, warna

kuning dengan simbol lima ribu rupiah dan warna hijau dengan simbol sepuluh ribu rupiah (septianingrum, 2024).



Gambar 1. 3 Uang Bambu Pasar Pundensari

Sumber: Pasar Pundensari, 2025

Perkembangan Pasar Pundensari semakin terlihat dari pengelolaan Pokdarwis Setopuro sejak awal pembukan Pasar Hingga saat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang menunjukkan adanya peningkatan pelaku UMKM yang ada di Pasar Pundensari.

Tabel 1. 4 Jumlah UMKM Pasar Pundensari

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2019	3
2	2020	9
3	2021	6
4	2022	14
5	2023	21
6	2024	36

Sumber : Pokdarwis Setopuro, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.4, meskipun terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM secara signifikan dari 3 unit pada tahun 2019 menjadi 36 unit pada tahun 2024, masih ditemui adanya permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat desa hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama penasehat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setopuro. Permasalahan ini muncul akibat perbedaan tingkat pendidikan yang menghambat pengembangan potensi Pasar Pundensari. Selain itu terdapat permasalahan lain antara lain masyarakat belum memanfaatkan media digital secara optimal untuk memperluas jangkauan promosi, kurangnya pengelolaan usaha yang profesional karena sebagian masyarakat yang berdagang kurang memahami sistem pembukuan, perencanaan bisnis dan manajemen keuangan yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meureta Ayu, 2020b) yang menunjukkan bahwa Pasar Pundensari sebagai pasar wisata menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pemasaran digital, minimnya inovasi produk, serta kurangnya pengelolaan usaha yang profesional. Selain itu, terdapat kesenjangan hasil penelitian sebelumnya dalam (Meureta Ayu, 2020) penelitian yang perlu dikaji kembali, karena penelitian tersebut hanya mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan akses pemasaran digital, minimnya inovasi produk, dan kurangnya pengelolaan usaha yang profesional di Pasar Pundensari, tanpa menyoroti upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Setopuro melalui tahapan penyadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan intelektual yang justru terbukti berhasil meningkatkan jumlah UMKM, omzet, dan kunjungan wisata. Selain itu, daya saing yang rendah dan kurangnya

promosi terstruktur menyebabkan potensi wisata pasar ini belum tergarap secara optimal.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gunungsari Nomor 140/50/KPTS/402.07/2022, Pokdarwis Setono Taruno Puroboyo (Setopuro) ditetapkan sebagai penanggung jawab utama pengembangan konsep pasar budaya Pasar Pundensari, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat melalui komunitas sektor pariwisata. Berdasarkan keputusan tersebut, peran Pokdarwis menjadi sangat krusial dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerahnya. Pokdarwis Setopuro melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan penyadaran potensi pariwisata kepada masyarakat, menggunakan fasilitator yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun guna mendorong kesadaran masyarakat. Melakukan berbagai pelatihan yaitu pelatihan Safety Food, pelatihan informasi digital, pelatihan *table manner* serta melakukan pembenahan sarana dan prasarana dengan menyediakan tempat sampah terpilah, revitalisasi budaya dengan menerapkan aturan penggunaan pakaian adat Jawa dan adanya atraksi kesenian budaya serta penggunaan kemasan eco-friendly dalam menekan penggunaan sampah plastik.

Kesadaran wisata masyarakat mendorong pengembangan potensi pariwisata di daerahnya serta mampu menciptakan kemandirian usaha dan peluang usaha masyarakat. Selain itu adanya transformasi kemampuan dan peningkatan kemampuan intelektual untuk mengoptimalkan potensi pariwisata di masa depan sehingga dapat berdampak secara berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan sehingga Pemberdayaan masyarakat desa oleh kelompok

sadar wisata ini akan mengacu pada teori tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Sulistiyan, 2017), yaitu tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku peduli, tahap transformasi kemampuan wawasan dan kecakapan ketrampilan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual.

Dengan mempertimbangkan potensi, serangkain aktivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi Pasar Pundensari yang optimal dan berkelanjutan, maka penulis tertarik untuk melihat lebih dalam terkait “Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setopuro dalam Pengembangan Potensi Pasar Pundensari Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian”Bagaimana pemberdayaan masyarakat oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) setopuro dalam pengembangan potensi pasar Pundensari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Setopuro di Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Ditinjau dari aspek akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus melengkapi referensi terkait pemberdayaan masyarakat desa.

2. Bagi Kelompok Sadar Wisata

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat desa dalam mengembangkan potensi desa yang optimal dan berkelanjutan.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan potensi Pasar Pundensari.

4. Bagi Universitas

Memperluas referensi dan literatur di perpustakaan, upaya pengadaan sumber kajian mutlak diperlukan guna mendukung penelitian serupa, khususnya bagi lingkungan akademik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur.